

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya media teknologi yang semakin pesat, kini Kota Bandung sebagai Kota yang semakin tinggi tingkat pertumbuhannya memerlukan tata kelola perkotaan yang lebih mumpuni. Sehingga pemerintah kota perlu meningkatkan kemampuan pengawasannya. Pengawasan kota yang dilakukan secara *realtime* tersebut dapat mengatasi berbagai permasalahan kota secara efektif dan efisien. Konsep *Bandung Smart City* merupakan usaha yang tengah dikembangkan oleh pemerintah guna melakukan pengawasan dengan baik terhadap dinas-dinas di lingkup Pemerintahan Kota Bandung.

Mengutip dari [smartcityindonesia.org](http://smartcityindonesia.org), “sebuah kota dapat dikatakan cerdas jika benar-benar dapat mengetahui keadaan kota di dalamnya, memahami permasalahan lebih dalam, dan dapat mengambil tindakan untuk menyelesaikannya.”

*Smart City* diartikan sebagai suatu konsep tata kelola kota yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang bertujuan untuk memonitor, menghubungkan, serta mengendalikan seluruh sumber daya yang ada agar lebih efektif dan efisien demi mewujudkan pelayanan yang maksimal kepada warganya serta selalu turut serta mendukung kelanjutan pembangunan kota.

*Smart City* tentu saja memanfaatkan semua hal yang berbasis teknologi yang bertujuan dalam peningkatan standar pelayanan kepada masyarakat. Pada acara Indonesia Smart City (ISCF) 2016 yang diadakan di Trans Luxury Hotel, Bandung pada bulan September 2016 Ridwan Kamil mengatakan bahwa melalui program *Bandung Smart City* ini Kota Bandung telah menyelesaikan sebanyak 70% permasalahan kota dengan memanfaatkan aplikasi atau teknologi informatika yang digunakan dalam pelayanan kepada masyarakat. Ridwan Kamil mengatakan 70% dari permasalahan yang sebelumnya tidak dapat diakses dan dikendalikan, melalui 300 aplikasi *Smart City* permasalahan tersebut dapat diselesaikan (Ramdhani, 2016).

Infrastruktur jaringan informasi sangat penting karena salah satu poin dari *Smart Cities* adalah konektivitas (*interconnected*), yaitu utilitas antar suatu organisasi telah saling terhubung sehingga langkah selanjutnya sesuai dengan susunan yang logis. Dengan *Smart Cities*, kami berharap dapat mewujudkan pengelolaan kota dan sistem informasi yang terintegrasi. Integrasi ini dapat dilakukan melalui jaringan digital yang mengelola geografi perkotaan, sumber daya, lingkungan, ekonomi, sosial dan jaringan lainnya.

*Smart city* merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan *sustainable city*, dimulai dari *livable city*, dilanjutkan dengan *green development city* dan akhirnya menjadi *smart city* yang memiliki kemampuan

bersaing seperti penjelasan pilar kota berkelanjutan dan berdaya saing sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Konsep Kota Berkelanjutan di Indonesia || sumber : Konfrensi e-indonesia Initiative (eii) dan Smart Indonesia Initiativs, Bandung 2015



Kota dengan konsep *Smart City* yang diusung oleh Kota Bandung merupakan kota yang dikembangkan melalui 6 pendekatan, yaitu: *Smart Government, Smart Living, Smart Environment, Smart Brand, Smart People* dan *Smart Economy*. *Smart government* berarti kota pintar yang memiliki kualitas kelembagaan pemerintahan dengan pemerintahan yang partisipatif untuk menarik semua aspirasi masyarakat. *Smart living* mengutamakan pembangunan perumahan yang menghadirkan kualitas hidup yang baik dan hemat energi. Lingkungan cerdas adalah lingkungan yang saling terintegrasi dan memberikan kualitas hidup yang baik baik secara sosial maupun lingkungan. *Smart Brand* merupakan inovasi pemasaran daerah yang dapat

meningkatkan daya saing di daerah dengan mengembangkan pariwisata, bisnis dan wajah kota. *Smart People* menciptakan ekosistem komunitas sosio-teknis yang manusiawi dan dinamis, baik fisik maupun virtual, untuk menciptakan masyarakat yang efisien, komunikatif, dan interaktif dengan platform digital yang kuat. Ekonomi cerdas adalah ekonomi yang dikembangkan secara mandiri yang memungkinkan orang berkolaborasi untuk meningkatkan modal mereka dengan cara terbaik.

Dalam penelitian ini, peneliti lebih fokus untuk membahas terkait aspek *Smart Living*. Yang mana dalam aspek tersebut terdapat tiga elemen dasar pengembangannya, yaitu kelayakan standar hidup, kelayakan kualitas medis dan kelayakan moda transportasi. Berdasarkan visi dari *Smart City* Kota Bandung yaitu “*Bandung is liveable & loveable Smart City*”, diketahui sasaran yang diharapkan adalah Kota yang layak buat ditinggali lantaran mempunyai taraf kepuasan & kualitas hayati yang tinggi. Hal itu ditunjukkan melalui indeks kebahagiaan, keamanan, dan infrastruktur yang baik.

Berkat konsep *Smart Living* pemerintah Kota Bandung berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dari pasokan kuantitas dan kualitas air minum, menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang memenuhi standar pelayanan minimum (SPM), untuk meningkatkan kualitas udara, perencanaan ruang berkualitas kota, pengembangan sistem transportasi yang dapat memastikan keamanan, efisiensi, kenyamanan dan ramah akan lingkungan.

Pemerintah Kota Bandung mengejawantahkan konsep *Smart Living* melalui program-program diantaranya gerakan pungut sampah, *area traffic*

*control system*, boseh (*bike sharing*), layad rawat, mobil kekasih, *wifi public*, e-parking, LRT, bus trans metro bandung, bandros (*bandung tour on bus*), bis sekolah, dan lain-lain.

Secara khusus pada komponen *Smart Living* beberapa program yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bandung tidak terlaksana secara maksimal. Sebagai contoh ada program parkir elektronik yang diresmikan pada bulan agustus 2017. Pada awal peresmiannya terdapat 445 unit terminal parkir elektronik (TPE) di 221 titik lokasi di Kota Bandung. Program ini diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah terkait parkir di Kota Bandung dan mampu membantu peningkatan pendapatan asli daerah Kota Bandung, namun nyatanya masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Pada tahun 2017, Pemerintah Kota Bandung menargetkan sebesar 140 miliar dalam realisasi yang diterima dari retribusi parkir, namun target tersebut tidak tercapai. Pemerintah hanya mendapatkan 5 Miliar lebih atau sekitar 5% dari target realisasi.

Gambar 1. 2 Terminal Parkir Elektronik di LW Panjang



Tempat parkir elektronik ini tidak bekerja secara maksimal, hal ini disebabkan pengoperasiannya yang kompleks, biaya yang mahal dan banyaknya tempat parkir liar. Masalah lain adalah orang lebih suka membayar kepada tukang parkir karena biayanya sama meskipun mereka parkir berjam-jam, yang berbeda dengan parkir meteran. Selain itu, kurangnya sumber sosialisasi dari pelaksana program, sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang program kios parkir elektronik.

Selanjutnya ada program Boleh atau *Bike Sharing*. Boleh merupakan sebuah program yang menyediakan penyewaan sepeda yang dapat digunakan untuk jarak dekat di dalam kota. Masyarakat dan terkhusus orang yang berwisata di Kota Bandung dapat memakai boleh untuk berkeliling dan menikmati wilayah Kota Bandung. Program Boleh ini dapat menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan.

Gambar 1. 3 Stand Boleh di Taman Lansia



Boleh menyediakan aplikasi yang dipakai untuk mengetahui letak *shelter* dan mengecek jumlah sepeda boleh yang tersedia. Aplikasi ini juga dapat digunakan untuk menghitung lama peminjaman dan menunjuk arah. Akan

tetapi, fitur penunjuk arah masih belum bisa digunakan. Pemeliharaan infrastruktur juga masih kurang, terbukti dengan berkurangnya jalur siklus akibat kerusakan. Selain itu, pendaftaran buseh hanya dapat dilakukan secara manual dengan mengunjungi stand-stand yang semakin mengurangi kenyamanan, apalagi pendaftaran hanya dapat dilakukan pada stand-stand tertentu walaupun acara ini sudah cukup lama digunakan.

Kemudian ada program Trans Metro Bandung (TMB), yang mana bertujuan untuk mengubah sistem pengelolaan angkutan umum perkotaan sehingga dapat mengurangi masalah kemacetan di Kota Bandung. Selain itu, penyediaan TMB juga agar menarik masyarakat untuk naik kendaraan umum dengan nilai jual waktu tempuh yang singkat, fasilitas yang nyaman, serta tarif yang ramah di kantong. Akan tetapi pada pelaksanaannya masih terdapat banyak hambatan, layanan bus TMB masih memiliki kesenjangan dalam hal konektivitas dengan sarana transportasi perkotaan lainnya, banyak sarana yang kondisinya kurang baik serta digunakan tidak sebagaimana mestinya, waktu tempuh yang masih cenderung lama, dan kualitas layanan dari armada TMB yang masih kurang.

Gambar 1. 4 Halte Bus TMB di jalan Soekarno-Hatta



Dari beberapa fenomena masalah di atas dapat dilihat bahwa konsep *Smart Living* di Kota Bandung masih mempunyai banyak hambatan. Tentunya ini menjadi catatan buruk pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan *Smart City* di Kota Bandung. Oleh karena itu, berangkat dari beberapa realitas di atas yang telah dipaparkan dari awal peneliti ingin lebih jauh lagi mendalami serta menggali terkait penerapan konsep *Smart City* di Kota Bandung yang ditinjau berdasarkan aspek-aspek dari program-program *Smart Living* dan akan dilakukan penelitian tentang “EFEKTIVITAS PENERAPAN KONSEP *SMART CITY* DITINJAU BERDASARKAN ASPEK *SMART LIVING* DI KOTA BANDUNG TAHUN 2021”. Penelitian ini berfokus pada aspek-aspek yang merupakan bagian dari program pemerintah Kota Bandung terkait kelayakan taraf hidup masyarakat Kota Bandung yang meliputi kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dilihat masalah yang teridentifikasi yaitu:

1. Kota Bandung yang merupakan kota dengan penduduk yang banyak perlu menerapkan konsep pengelolaan kota yang terintegrasi dengan basis teknologi informasi.
2. Program-program pemerintah yang merupakan turunan dari *Smart Living* masih banyak terkendala sehingga kurang optimal.

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Rumusan Masalah yang sudah peneliti buat tentu tak terlepas dari apa yang sudah diamati dan sudah dipaparkan di dalam latar belakang penelitian serta identifikasi masalah. Maka dari itu rumusan masalah yang sudah peneliti rumuskan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Ketepatan Kebijakan dari Smart Living di Kota Bandung?
2. Bagaimana Ketepatan Pelaksanaan dari Smart Living di Kota Bandung?
3. Bagaimana Ketepatan Target dari Smart Living di Kota Bandung?
4. Bagaimana Ketepatan Lingkungan dari Smart Living di Kota Bandung?
5. Bagaimana Ketepatan Proses dari Smart living di Kota Bandung?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Ketepatan Kebijakan dari Smart Living di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui Ketepatan Pelaksanaan dari Smart Living di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui Ketepatan Target dari Smart Living di Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui Ketepatan Lingkungan dari Smart Living di Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui Ketepatan Proses dari Smart Living di Kota Bandung.

## **E. Manfaat Hasil Penelitian**

Peneliti sangat mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat ke depannya baik secara teoritis maupun secara praktis. Maka di bawah ini disebutkan keinginan peneliti baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan juga bisa mempertajam pemikiran secara kritis dan menambah khazanah pengetahuan dalam bidang ilmu sosial khususnya yang berhubungan dengan konsep *Smart City* yang diterapkan guna kemajuan suatu daerah. Terlebih dewasa ini segala permasalahan sudah sangat kompleks dan dengan adanya inovasi dunia digital melalui konsep *Smart City* ini dapat mengatasi permasalahan tersebut.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan seperti pemerintah yang mempunyai wewenang terhadap sistem dan kebijakan. Penelitian ini juga bermanfaat untuk institusi pendidikan sebagai bahan yang dipakai untuk media pembelajaran atau lain sebagainya. Terakhir penelitian ini juga bermanfaat untuk penelitian selanjutnya yang mempunyai minat terhadap tema penelitian ini.

## F. Kerangka Pemikiran

Kebijakan publik adalah aturan-aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, untuk kepentingan masyarakat luas. Kebijakan publik merupakan salah satu respon pemerintah terhadap permasalahan sosial yang berkaitan dengan masyarakat luas. Kerangka penelitian ini bermula dari adanya upaya pemerintah untuk berinovasi dan merespon adanya tren digitalisasi di lingkup masyarakat luas dengan menerapkan suatu konsep *Smart City* atau Kota Cerdas. Konsep *Smart City* menekankan pentingnya inovasi untuk memecahkan masalah setiap kota dengan menggunakan teknologi ICT, sensor dan analisis data sebagai elemen pendukung untuk memfasilitasi solusi memecahkan masalah. Peneliti lebih memfokuskan lagi terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup masyarakat dengan menerapkan *Smart Living* yang merupakan salah satu aspek dari *Smart City* itu sendiri.

Beberapa peraturan atau regulasi telah dibuat oleh pemerintah Kota Bandung guna mendukung terlaksananya konsep *Smart living* ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Peraturan Wali Kota Bandung No. 703 tahun 2017 tentang layanan layad rawat di Kota Bandung.
2. Keputusan Wali Kota Bandung No. 462.2/kep.077-Dispora tahun 2015 tentang pembentukan tim pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana olahraga di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

3. Keputusan Wali Kota Bandung No. 445.4/kep.672-Dinkes tahun 2017 tentang penetapan pusat kesehatan masyarakat perkotaan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
4. Keputusan Wali Kota Bandung No. 551/kep-648-Dishub/2017 tentang penetapan lokasi dan posisi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir di Kota Bandung.

Pelaksanaan *Smart Living* ini sangat diperlukan dikarenakan Kota Bandung merupakan Kota Besar yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi sehingga menyebabkan beberapa permasalahan lingkungan. Dengan adanya penerapan *Smart Living* ini yang berfokus pada peningkatan kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi, diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kemudahan *mobility* masyarakat di Kota Bandung.

Agar kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka kebijakan tersebut harus dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Untuk melihat lebih jauh terkait implementasi konsep *Smart Living* memang telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka perlu dilakukan analisis efektivitas penerapan konsep *Smart Living* di kota Bandung. Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan analisis efektivitas penerapan *Smart Living* di Kota Bandung, peneliti menggunakan 5 indikator, yaitu: ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses. Sehingga hasil penelitian yang telah dilakukan dapat melihat apakah implementasi konsep

*Smart living* tersebut efektif atau tidak. Berikut gambaran kerangka pikir dari penelitian ini:

Bagan 1. 1 Kerangka Pemikiran Penelitian

